

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada PRD uuntuk di bahas bersama;</p> <p>bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana di maksud di atas merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang di jabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah di sepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 5 Desember 2014;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015.</p>
	<p>b. Dasar Hukum :</p> <p>UU No. 29 Th 1959; UU No.12 Th 1985; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No. 109 Th 2000; PP No. 20 Th 2001; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 21 Th 2007; PP No. 71 Th 2010; PerMendagri No. 13 Th 2006; PerMendagri No. 55 Th 2008; PerMendagri No. 54 Th 2010; PerMendagri No. 64 Th 2013; PerMendagri No. 37 Th 2014; Perda No. 3 Th 2009; Perda No. 4 Th 2009; Perda No. 3 Th 2010; Perda No. 12 Th 2011; Perda No. 13 Th 2011; Perda No. 5 Th 2012; Perda No. 5 Th 2014; Perwali No. 69 Th 2009; Perwali No. 28 Th 2014; Perwali No. 29 Th 2014; PerDPRD No. 1 Th 2014; KepDPRD No. 22 Th 2014</p>
	<p>c. I. Pasal I APBD TA-2015</p> <p>II. Pasal 2 Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</p> <p>III. Pasal 3 Belanja Daerah; Belanja Tidak Langsung; Belanja Langsung</p> <p>IV. Pasal 4 Pembiayaan Daerah; Penerimaan; Pengeluaran</p> <p>V. Pasal 5 Uraian Lebih Lanjut APBD dalam pasal 1</p> <p>VI. Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan</p> <p>VII. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan</p>
Catatan	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2014</p>

	- Ditetapkan 29 Desember 2014
--	-------------------------------